

BAB V

PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Depok Tahun 2018—2021 merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang merupakan bagian pendukung operasional dari implementasi Misi ke-1 RPJMD Kota Depok Tahun 2016—2021 yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan. Dokumen *Road Map* ini secara substansial telah memuat sasaran, indikator, dan program yang akan dicapai dalam setiap tahapan. Program dan kegiatan yang ada dalam *Road Map* ini merupakan kegiatan prioritas dan strategis dalam mendukung percepatan tercapainya sasaran-sasaran Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Sehubungan dengan pelaksanaan *Road Map* ini, maka instansi yang berwenang membidangi tugas pokok dan fungsi terkait dengan lingkup area Reformasi Birokrasi, perlu memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan sebagai berikut.

1. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Depok ini menjadi dasar atau acuan bagi Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Depok dalam menyusun dokumen perencanaan daerah.
2. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Depok ini merupakan pedoman bagi Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Depok dalam menyusun perencanaan program/ kegiatan, dan anggarannya dalam dokumen KUA/PPA dan RKA-PD setiap tahun dalam kurun waktu Tahun 2018—2021, dengan demikian diharapkan dapat terjadi sinergitas arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi selama periode waktu 4 (empat) tahun kedepan.
3. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Depok menjadi dasar penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Depok serta menjadi dasar bagi DPRD Kota Depok dan anggota masyarakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
4. Dalam rangka menjaga konsistensi, sinergitas dan keberlangsungan pelaksanaan dan keberhasilan Reformasi Birokrasi maka diperlukan monitoring dan pelaporan implementasi *Road Map* Reformasi Birokrasi secara berkala. Untuk itu, masing-masing perangkat daerah yang

membidangi pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar melakukan pengawasan internal serta bertanggung jawab atas pencapaian kinerja dan sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS